

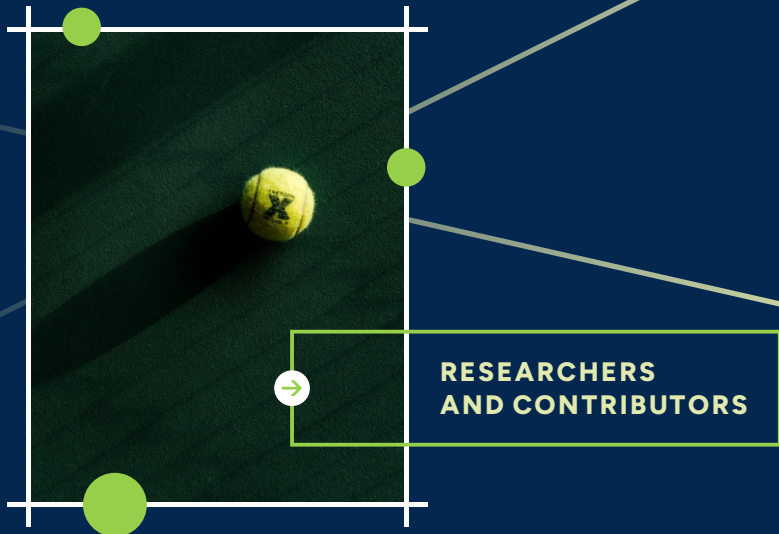
Digitimes #52
September 2025

MEMBEDAH POLEMIK "PAJAK PADEL", APAKAH SEBAGAI BENTUK KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH?



**io Center for
Digital Society**
A NEW ERA TO RETHINK DIGITAL

Room BC 201 - 203
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia 1, Bulaksumur, Yogyakarta
(0274) 563362, Ext. 116 | cfds.fisipol@ugm.ac.id



Penulis

Mahardi Nalendra Syafa

Editor

Achmed Faiz Yudha Siregar

Desainer & Tata Letak

Ahmad Nur Hasan

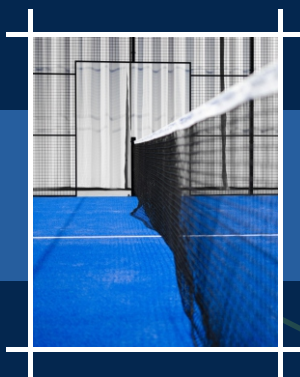
September 2025



DAFTAR ISI



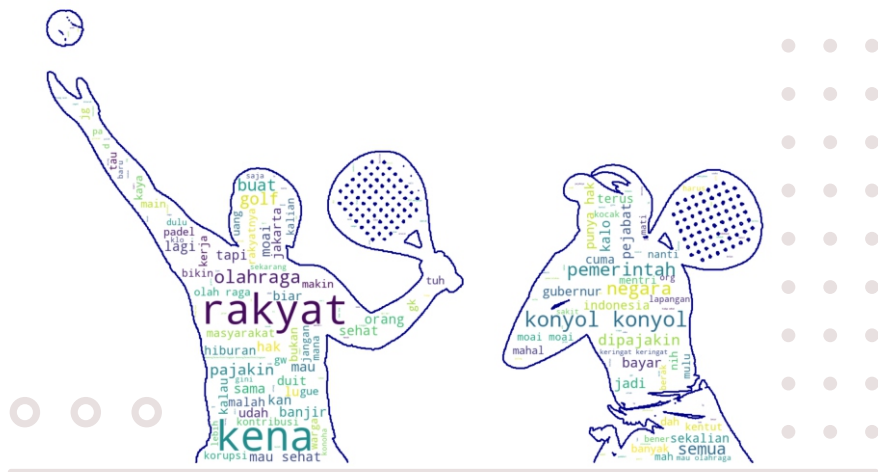
1	Pendahuluan
4	Pembahasan
12	Kesimpulan
14	Referensi





Fenomena Gaya Hidup Jakarta dan Munculnya Kebijakan

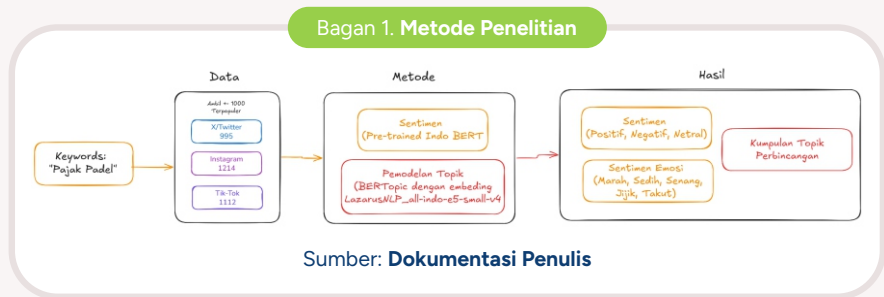
Dalam hingar bingar kota Jakarta, tren datang dan pergi dengan cepat, namun sedikit yang berhasil menangkap perhatian publik yaitu padel. Olahraga ini melesat popularitasnya, bertransformasi dari sekadar olahraga menjadi sebuah bukti gaya hidup dan simbol status sosial baru di kalangan masyarakat perkotaan. Seiring dengan berkembangnya komunitas dan menjamurnya lapangan-lapangan baru, padel menjadi fenomena sosial yang signifikan hingga akhirnya bersinggungan dengan kebijakan publik pada pertengahan tahun 2025.



Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana polarisasi sentimen dan spektrum emosi publik terhadap kebijakan "pajak padel" di media sosial?
- 2 Tema-tema percakapan dominan apa saja yang muncul, dan bagaimana tema tersebut merefleksikan narasi ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah?

Metodologi Penelitian



Penelitian ini membedah reaksi publik dengan pendekatan analisis fenomena masyarakat digital melalui media sosial. Melalui kata kunci "Pajak padel", sebanyak **3.321 unggahan** dari platform Twitter, Instagram, dan TikTok selama periode puncak Juni-Juli 2025 akan dianalisis secara komprehensif. Analisis sentimen dilakukan menggunakan model *machine learning* **IndoBERT** untuk memetakan polaritas reaksi (positif, negatif, netral) serta sebaran emosinya (marah, sedih, senang, jijik, takut) ^[4]. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi tema-tema perdebatan secara mendalam, digunakan pemodelan topik (*topic modeling*) dengan **BERTopic** yang diperkuat oleh model *embedding* **LazarusNLP_all-indo-e5-small-v4**, guna mengungkap struktur argumen dan keluhan utama dari Masyarakat ^[5].



→ PEMBAHASAN

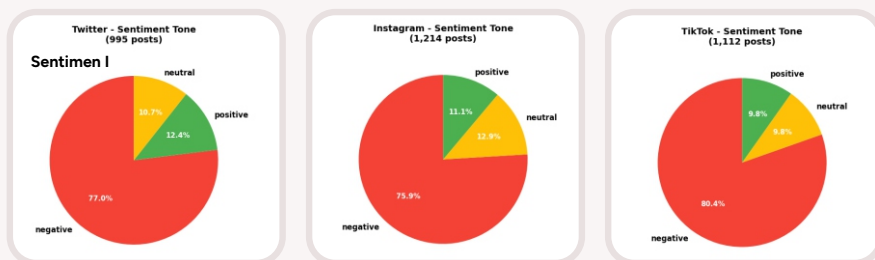
○ Peta Sentimen Percakapan

Berdasarkan sebaran sentimen publik, dari 3.321 unggahan menunjukkan dominasi sentimen negatif terhadap kebijakan pajak padel. Sebagaimana dirangkum pada Tabel 1, sebesar 75-80% rata rata di media social Adalah sentimen **negatif**. Angka ini melampaui gabungan rata rata **sentimen positif 9-11%** dan **netral 9-12%**.

Tabel 1: Ringkasan Kuantitatif Sentimen Publik Terkait Pajak Padel (Juni-Juli 2025)

 TWITTER (995 posts): Sentiment Tone: NEGATIVE: 766 (77.0%) POSITIVE: 123 (12.4%) NEUTRAL: 106 (10.7%)	 INSTAGRAM (1,214 posts): Sentiment Tone: NEGATIVE: 922 (75.9%) NEUTRAL: 157 (12.9%) POSITIVE: 135 (11.1%)	 TIKTOK (1,112 posts): Sentiment Tone: NEGATIVE: 894 (80.4%) NEUTRAL: 109 (9.8%) POSITIVE: 109 (9.8%)
--	--	---

Gambar 2. Distribusi Sentimen di Media Sosial X/Twitter, Instagram, & Tik-Tok



Sumber: Dokumentasi Penulis

Rasio antara sentimen negatif dan positif yang mencapai hampir 7 banding 1 menunjukkan perbedaan yang tidak seimbang. Tingginya volume dan keseragaman sentiment negative pada tiga platform media sosial yang berbeda mengindikasikan bahwa diskursus ini merupakan penolakan yang bersifat massal.

Isu pajak padel berhasil melampaui batas komunitas pemainnya sendiri dan menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Warganet yang mungkin belum pernah memegang raket padel ikut serta dalam percakapan, menggunakan isu ini sebagai sarana untuk menyalurkan frustrasi yang lebih umum terhadap pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan pajak padel telah bertransformasi menjadi simbol ketidakpuasan kolektif, sebuah studi kasus yang menunjukkan bagaimana kebijakan teknis dapat memicu **krisis kepercayaan publik** ketika dianggap tidak adil dan tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.

Setelah mengetahui dominasi sentimen negatif, analisis lebih dalam dilakukan untuk membedah narasi-narasi utama yang mendorong penolakan publik. Dari analisis *word cloud* dan unggahan-unggahan representatif.

The figure consists of three word clouds, each representing negative tweets about the 2019 Indonesian Presidential Election. The left cloud, based on 156 tweets, shows 'negara' and 'pajak' as significant terms. The middle cloud, based on 403 tweets, is heavily dominated by 'pemerintah' and 'pajak'. The right cloud, based on 284 tweets, also features 'negara' and 'pajak' prominently.

Mendalami sentimen negatif yang dominan, analisis kualitatif mengungkap beberapa narasi utama yang mendorong penolakan publik. Narasi paling mendasar adalah persepsi bahwa pemerintah justru menolak gaya hidup sehat. Hal ini tecermin dari masifnya kata "olahraga" dan "sehat" yang disandingkan dengan "dipajakin" di berbagai platform, seperti yang disampaikan oleh seorang pengguna Twitter yang menyebut kebijakan ini "kolot" karena gagal melihat olahraga sebagai pendorong kesehatan publik.

Puncaknya, ketidakpuasan ini ada pada kritik atas kompetensi dan prioritas pemerintah, di mana munculnya kata "konyol" dan "banjir" menandakan bahwa publik menganggap kebijakan ini absurd di tengah masalah kota yang lebih krusial.

Sentimen negatif di berbagai platform ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa momentum dari olahraga padel yang baru dan populer ini sengaja dimanfaatkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut tidak lagi dilihat sebagai upaya administratif yang wajar, melainkan sebagai tindakan oportunis untuk mengeruk pendapatan dari tren yang sedang digandrungi warga masyarakat. Pada akhirnya, perasaan 'dimanfaatkan' inilah yang menjadi puncak dari krisis kepercayaan, di mana pemerintah tidak lagi dipandang sebagai fasilitator kegiatan positif, melainkan sebagai pihak yang mencari keuntungan dari setiap kegiatan masyarakat.

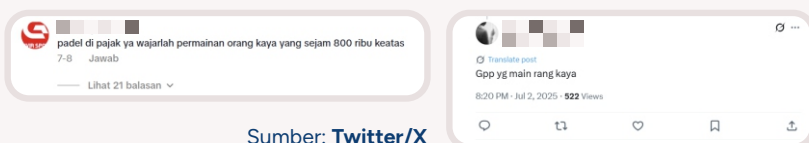
● Narasi Positif dan Netral

Gambar 5. Wordcloud Sentimen Positif (Hijau) dan Netral (Abu-abu) di Media Sosial X/Twitter, Instagram, & Tik-Tok



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 6. Representasi Komentar Sentimen Positif dan Netral

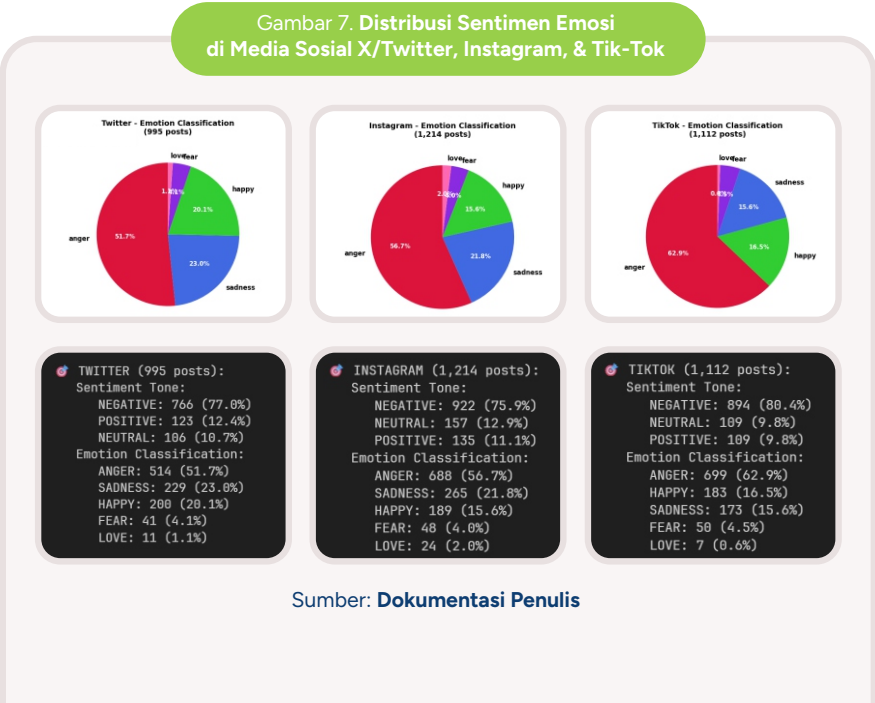


Sumber: Twitter/X

Meskipun porsinya jauh lebih kecil, sentimen positif dan netral menyajikan sebuah narasi tandingan yang konsisten. Inti dari argumen ini adalah kewajaran pajak karena demografi pemain padel yang dianggap berasal dari kalangan ekonomi mampu. Hal ini diperkuat oleh seringnya kata "golf" muncul dalam *word cloud* positif dan netral, menunjukkan bahwa publik membandingkan padel dengan olahraga lain yang identik dengan status sosial tinggi. Bagi segmen masyarakat ini, kebijakan tersebut tidak dilihat sebagai pembebanan yang merugikan, melainkan sebagai bentuk kontribusi yang wajar dari kelompok masyarakat yang lebih berkecukupan.

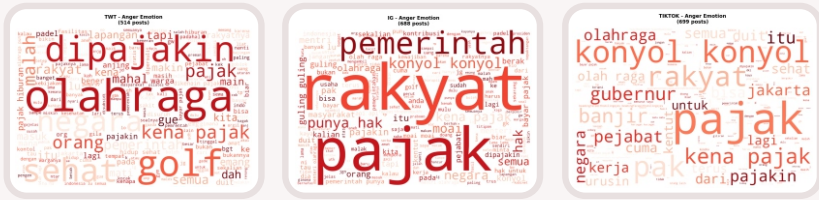
Emosi Marah dan Sedih

Lebih dari sekadar sentimen negatif, analisis emosi menunjukkan spektrum perasaan publik yang didominasi oleh amarah dan kesedihan, yang masing-masing memiliki narasi pemicunya sendiri.



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 8. Wordcloud Sentimen Emosi Marah di Media Sosial X/Twitter, Instagram, & Tik-Tok



Sumber: Dokumentasi Penulis

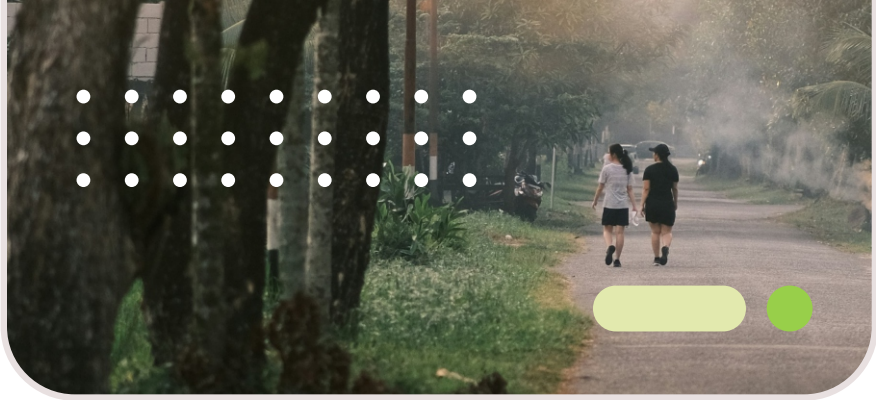
Gambar 9. Representasi Komentar Sentimen Emosi Marah



Sumber: Dokumentasi Penulis

Marah adalah emosi yang paling dominan, mencakup rata-rata 60% dari unggahan yang terdeteksi memiliki emosi. Kemarahan ini bukan sekadar ketidaksukaan, melainkan luapan frustrasi terhadap apa yang dianggap sebagai ketidakadilan. Hal ini tecermin dalam word cloud emosi marah yang dipenuhi kata-kata konfrontatif seperti "pemerintah", "rakyat", "pajak", dan "konyol". Salah satu unggahan menunjukkan kedalaman amarah ini, seperti cuitan seorang warganet "Warga mau sehat aja suseh ampe dipajakin begini, sementara pajak dipake buat pejabat2 feodal yg gila protokol tp minim kinerja." Komentar ini secara eksplisit menghubungkan pajak padel dengan isu yang lebih besar mengenai alokasi anggaran dan kinerja pemerintah. Dengan demikian, kemarahan ini adalah bentuk perlawanan aktif terhadap kebijakan yang dirasa merampas hak warga untuk sehat dan secara langsung menggerus kepercayaan pada integritas pemerintah.





Gambar 10. Wordcloud Sentimen Emosi Sedih di Media Sosial X/Twitter, Instagram, & Tik-Tok



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 11. Representasi Sentimen Emosi Sedih

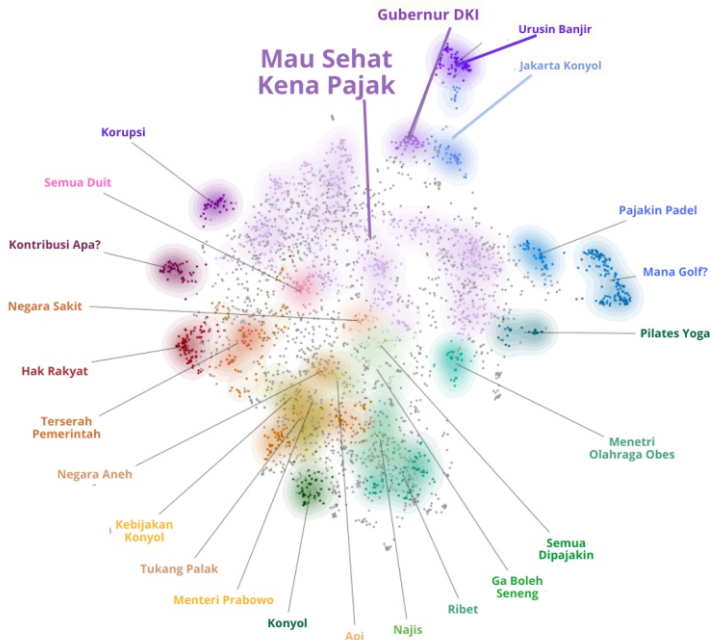


Sumber: Dokumentasi Penulis

Di urutan kedua, kesedihan muncul sebagai emosi yang signifikan dengan porsi rata-rata sekitar 20%. Berbeda dari amarah, kesedihan di sini lebih mencerminkan rasa kecewa dan kepasrahan. *Word cloud* pada kategori ini diisi dengan kata-kata seperti "sedih", "menangis", dan "kecewa", yang menggambarkan suasana muram. Perasaan ini terangkum dalam komentar-komentar yang bernada pasrah, seperti "*cape cape mengajak orang orang buat hidup sehat,, giliran udah pada seneng olah raga palah di pajakin*" dan "*Semuanya kena pajak 🤔*". Emosi ini menandakan lunturnya harapan masyarakat terhadap pemerintah.

Membedah Peta Topik Perdebatan Padel

Gambar 12. Sebaran Topik Mengenai Pajak Padel di Media Sosial Twitter/X, Instagram, & Tiktok



Sumber: Dokumentasi Penulis

Peta pemodelan topik pada Gambar menyajikan visualisasi dari keseluruhan lanskap perdebatan, memetakan kluster-kluster narasi yang terbentuk di ruang digital. Interpretasi peta ini didasarkan pada dua aspek utama yaitu besarnya sebuah kluster yang menandakan volume atau dominasi topik tersebut, dan kedekatan antar kluster yang menunjukkan kemiripan.

Terlihat bahwa kluster "Mau Sehat Kena Pajak" merupakan narasi dengan area terluas, menandakan posisinya sebagai keluhan paling utama dari publik. Selain itu, peta ini juga menunjukkan bagaimana topik-topik yang relevan saling berdekatan. Sebagai contoh, di sisi kanan peta, kluster "Pajakin Padel" terletak berdekatan dengan topik pembanding seperti "Mana Golf?" serta olahraga lain yang juga sedang tren, yaitu "Pilates Yoga". Dari struktur peta ini, kita dapat membedah beberapa area narasi kunci yang membentuk polemik ini secara mendalam.

A. Klaster "Mau Sehat Kena Pajak?"

Klaster narasi terbesar dalam peta ini adalah "Mau Sehat Kena Pajak", yang menunjukkan bahwa hal ini adalah ekspresi utama percakapan sebagian besar warganet. Narasi ini menyoroti pemerintah sebagai penghalang bagi niat baik warga untuk hidup sehat. Topik ini berkaitan langsung dengan emosi amarah dan kekecewaan yang telah dibahas sebelumnya, menjadikannya keluhan paling umum pada polemik ini.

B. Klaster "Mana Golf?"

Klaster topik kedua yang menarik perhatian terpusat pada klaster "Mana Golf?". Perbandingan dengan olahraga golf yang secara stereotip dianggap sebagai hobi "orang kaya" digunakan secara efektif untuk menyoroti persepsi adanya standar ganda. Narasi ini menuduh pemerintah hanya berani menyasar "kelas menengah ke atas" sementara kelompok yang lebih "elite" seolah mendapat perlakuan istimewa.

Pemerintah berupaya merespons dengan penjelasan teknis bahwa golf sudah dikenai PPN 11% oleh pusat, dan hukum melarang pajak berganda. Namun, penjelasan legalistik ini sama sekali tidak efektif. Bagi publik, "pajak adalah pajak," dan perbedaan detail teknis tidak relevan dengan rasa keadilan mereka. Kegagalan pemerintah di sini adalah kegagalan menerjemahkan logika hukum menjadi narasi yang dapat diterima secara sosial dan emosional. Apakah ini memang upaya pemerintah untuk mencari kesempatan ditengah viralnya olahraga padel atau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari aktivitas olahraga di publik? Pada akhirnya, narasi publik tentang ketidakadilan kelas terbukti jauh lebih kuat dan mudah menyebar, secara telak meruntuhkan kepercayaan pada keadilan sistem fiskal pemerintah.



C. Klaster "Gubernur DKI" & "Urusin Banjir"

Klaster topik selanjutnya memiliki target utama yaitu Gubernur DKI Jakarta. Warganet menghubungkan isu pajak ini dengan masalah perkotaan yang lebih fundamental, seperti yang terlihat pada klaster "Urusin Banjir".

Hal ini adalah contoh bagaimana publik membingkai pemerintah sebagai institusi yang salah prioritas. Pemerintah dianggap sibuk mengurus pendapatan minor dari hobi warganya, sementara lalai dalam tugas utamanya melindungi warga dari bencana banjir yang selalu terjadi.

→ KESIMPULAN

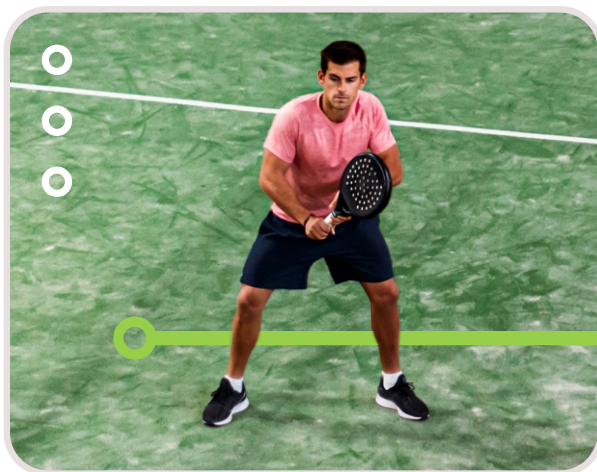
Penelitian terhadap polemik pajak padel ini menunjukkan sebuah kesimpulan penting yaitu reaksi negatif publik yang sangat besar bukan hanya disebabkan oleh kebijakan pajak itu sendiri. Reaksi ini muncul karena sudah ada masalah mendasar sebelumnya, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah kepada pemerintah, perasaan diperlakukan tidak adil, dan cara komunikasi pemerintah yang sulit dipahami oleh warga. Kebijakan pajak padel hanyalah pemicu yang menyulut kemarahan publik yang lebih besar.

Dari studi kasus ini, ada beberapa pelajaran penting bagi pemerintah di era digital:

- 1 Penjelasan Logis Saja Tidak Cukup. Di era digital, sebuah kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan dasar hukum yang benar. Pemerintah juga harus mampu menjelaskannya dengan narasi yang kuat, sederhana, dan sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.
- 2 Komunikasi Harus Menyentuh Masyarakat. Memberikan informasi mengenai dasar hukum saja tidak akan efektif. Pemerintah harus bisa menjawab pertanyaan dasar di benak warga, seperti: "Apa untungnya kebijakan ini bagi saya dan lingkungan saya?" atau "Mengapa kami harus percaya pada pemerintah?".
- 3 Waspada Isu yang Terlihat Sepele. Pemerintah harus lebih berhati-hati, karena kebijakan yang tampaknya kecil atau hanya menysar kelompok tertentu dapat dengan cepat menjadi simbol kemarahan publik yang lebih luas. Perlu ada pertimbangan mengenai bagaimana reaksi publik sebelum sebuah kebijakan diluncurkan.

Ke depannya, kasus "pajak padel" ini akan menjadi contoh bagaimana publik akan bereaksi terhadap kebijakan serupa. Setiap kebijakan pajak baru yang menyangkut gaya hidup masyarakat akan selalu dinilai berdasarkan tiga hal: apakah kebijakan itu terasa adil, apakah prioritas pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan warga, dan seberapa besar tingkat kepercayaan publik saat itu.

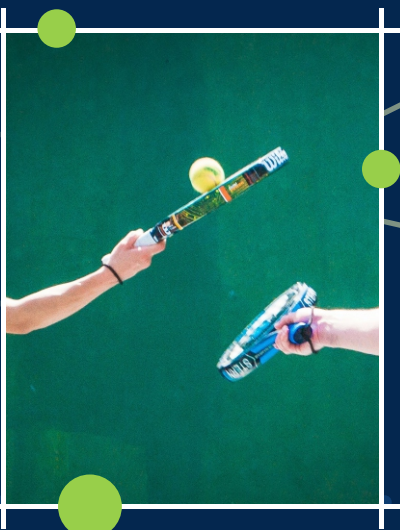
Sebagai rekomendasi, pemerintah sebaiknya fokus untuk membangun kembali kepercayaan publik terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan pajak baru. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan hasil kerja yang nyata dari pajak yang sudah terkumpul, misalnya dengan meningkatkan penanganan banjir atau memperbaiki layanan publik. Selain itu, cara berkomunikasi harus diubah dari yang semula satu arah dan kaku, menjadi komunikasi dua arah yang lebih mendengarkan, berempati, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti warga. Tanpa kepercayaan yang kuat, kebijakan sebaik apa pun akan selalu berisiko ditolak oleh opini publik di era digital.





REFERENSI

- [1] Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, (2025). *Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 854 Tahun 2024*. [online] Website Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Diakses di: <https://dpp.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan/keputusan-kepala-bapenda-dki-jakarta-nomor-257-tahun-2025-tentang-perubahan-kedua-atas-keputusan-kepala-badan-pendapatan-daerah-nomor-854-tahun-2024> [Diakses pada 1 September 2025]
- [2] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (2024). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. [online] Website Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Diakses di: <https://bapenda.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan/perda-nomor-1-tahun-2024-tentang-pajak-dan-retribusi-daerah> [Diakses pada 1 September 2025].
- [3] Republik Indonesia, (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. [online] Database Peraturan BPK. Diakses di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022> [Diakses pada 1 September 2025].
- [4] Koto, F., Rahimi, A., Lau, J.H. and Baldwin, T., 2020. IndoLEM and IndoBERT: A benchmark dataset and pre-trained language model for Indonesian NLP. arXiv preprint arXiv:2011.00677.
- [5] Wongso, W., Setiawan, D., Joyoadikusumo, A. and Limcorn, S., 2025, July. Lazarus NLP at SemEval-2025 Task 11: Fine-Tuning Large Language Models for Multi-Label Emotion Classification via Sentence-Label Pairing. *In Proceedings of the 19th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2025)* (pp. 763-772).





ABOUT CfDS

Center for Digital Society (CfDS) is the research center established by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada. The institution is created under the concern over the contemporary dynamics of socio-political condition of the world that is accentuated by the impeccable influence of information technology. The phenomenon triggers the new patterns and complexities in the society, and thus requires new approaches in managing such complexities.

CfDS pledged to delve more on the study of contemporary digital society, including related issues surrounding the topic; such as the issues of smart city and urban development. The emphasis is then put on the utilization of technology to shape the society in becoming digitalized, as well as to bring solvency to social issues.



VISION

Solving Social Problem and Accelerating Prosperity through Indonesia Digital Society



ACTIVITIES



Research and Development

Dissemination and Publication

Education and Policy Advocacy



facebook.com/cfdsugm



[Center for Digital Society \(CfDS\)](#)



[cfds_ugm](#)



[@cfds_ugm](#)



[@cfds_ugm](#)



[CfDS UGM](#)